

Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Raba Kota Bima

Putra Chairil Akbar, Bambang Kusbandrijo, Joko Widodo

Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: putrachairil82@gmail.com

Article Information

Submitted: 19

December 2024

Accepted: 20

December 2024

Online Publish: 20

January 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Raba, Kota Bima, serta dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkap dinamika pelaksanaan kebijakan, termasuk persepsi guru, kepala sekolah, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka mendorong pengembangan kompetensi siswa, dengan kepala sekolah sebagai pemimpin transformasi yang memfasilitasi perubahan melalui pendekatan digital seperti administrasi berbasis "paperless." Guru berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan pembelajaran inovatif dan kontekstual, meski menghadapi tantangan dalam adaptasi teknologi dan metode baru. Proyek penguatan profil Pelajar Pancasila memperkuat karakter siswa melalui nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan signifikan dalam literasi dan numerasi, yang diukur melalui asesmen formatif dan sumatif menggunakan e-Rapor. Transformasi ini melibatkan kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan orang tua, didukung pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Namun, keterbatasan sumber daya dan pola pikir tradisional menjadi kendala yang diatasi melalui strategi kolaboratif. Kesimpulannya, implementasi Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan inovasi kepada sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan membangun karakter siswa, meskipun memerlukan dukungan berkelanjutan dari semua pihak untuk keberlanjutannya.

Kata kunci: Kurikulum Merdeka, Sekolah Dasar, Hasil Belajar Siswa

Abstract

This study aims to describe the implementation of the Merdeka Curriculum in public elementary schools in the Raba District of Bima City, as well as its impact on student learning outcomes. Using a qualitative descriptive method, this research reveals the dynamics of policy implementation, including the perceptions of teachers, school principals, students, and other stakeholders. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the Merdeka Curriculum promotes the development of student competencies, with the school principal playing a key role as a transformational leader facilitating change through digital approaches such as "paperless" administration. Teachers serve as facilitators in creating innovative and contextual learning, despite challenges in adapting to new technology and methods. The Pancasila Student Profile reinforcement project strengthens students' character through values of tolerance and diversity. Student learning outcomes show significant improvement in literacy and numeracy, measured through formative and summative assessments using e-Rapor. This transformation involves collaboration among teachers, school principals, and parents, supported by continuous training and mentoring. However, limited resources and traditional mindsets pose challenges, which are addressed through collaborative strategies. In conclusion, the implementation of the Merdeka

How to Cite

DOI

e-ISSN

Published by

Putra Chairil Akbar, Bambang Kusbandrijo, Joko Widodo/Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Raba Kota Bima/Vol 5 No 6 (2025)

<http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i6.564>

2721-2246

Rifa Institute

Curriculum provides schools with the freedom for innovation, enhances the quality of learning, and builds students' character, although it requires ongoing support from all parties for its sustainability.

Keywords: *Merdeka Curriculum; Elementary Schools; Student Learning Outcomes*

Pendahuluan

Kehidupan modern berkembang dengan cepat karena kemajuan teknologi yang telah menandai era globalisasi saat ini, yang menyebabkan banyak masalah di berbagai bidang, salah satunya adalah pendidikan (Kellie Praja Putra, H. Khasan Effendy, & Rossy Lambelanova, 2021); (Suryani, Muspawi, & Aprillitavivayarti, 2023) (Tarigan, Sianturi, br Sinaga, Siringoringo, & Naibaho, 2024). Sekarang orang dapat berkomunikasi satu sama lain di mana saja dan kapan saja tanpa mengenal waktu, yang membuat pencarian informasi menjadi lebih mudah (Schoenefeld & Jordan, 2019); (Hankivsky & Cormier, 2011); (Ewert, Loer, & Thomann, 2021); (Shofia Hattarina, Nurul Saila, Adenta Faradila, Dita Refani Putri, & RR.Ghina Ayu Putri, 2022). Karena masyarakat modern bergantung pada teknologi informasi dalam semua aspek hidup mereka, menggunakannya dengan tidak bijak dapat berdampak buruk pada kita (Tarigan et al., 2024); (Schmidt & Sewerin, 2019); (Wardani, Sukandar, Baliwati, & Riyadi, 2021). Pembelajaran berpusat pada siswa, juga dikenal sebagai pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa, adalah metode pendidikan yang paling populer saat ini (Mergoni & De Witte, 2022); (Leckel, Veilleux, & Dana, 2020); (Carter, 2016); (Dunlop, Ongaro, & Baker, 2020); (Rogers, 2007); (Nasution, 2023).

Metode pembelajaran ini memberikan banyak kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan juga mendorong guru untuk membantu siswa menemukan hal baru (Fernandes, 2023); (Valle-Cruz, Criado, Sandoval-Almazán, & Ruvalcaba-Gomez, 2020); (Santosa, 2021). Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta sebagai landasan untuk pembuatan bahan ajar, materi pembelajaran, dan evaluasi dan pengukuran hasil belajar siswa (Ferretti, Pluchinotta, & Tsoukiàs, 2019); (Ariyanti, 2023); (Bourgeois & Maltais, 2023). Sebaliknya, pembelajaran juga berperan dalam kurikulum karena membantu dalam mengevaluasi keefektifan kurikulum (Hudson, Hunter, & Peckham, 2019). Proses pembelajaran memberi guru dan lembaga pendidikan umpan balik tentang seberapa efektif dan efisien kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah suatu rangkaian rencana dan pengaturan yang menjelaskan tujuan, isi, materi pelajaran, dan metode yang digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikan nasional (Kern, Rogge, & Howlett, 2019); (Rusmiati, Ashifa, & Herlambang, 2023).

Tentu, pemulihan sistem pendidikan dari krisis belajar tidak bisa diwujudkan melalui perubahan kurikulum saja (Dennis, 2018). Diperlukan juga berbagai upaya penguatan kapasitas guru dan kepala sekolah, pendampingan bagi pemerintah daerah, penataan sistem evaluasi, serta infrastruktur dan pendanaan yang lebih adil (Ramadina, 2021). Kurikulum berpengaruh besar pada apa yang diajarkan oleh guru, juga pada bagaimana materi tersebut diajarkan. Karena itu, kurikulum yang dirancang dengan baik akan mendorong dan memudahkan guru untuk mengajar dengan lebih baik (Juli Iswanto, 2022); (Yansah, Asbari, Jamaludin, Marini, & Zulela, 2023).

Perubahan kurikulum adalah suatu keharusan dalam dunia pendidikan, di lihat dari sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai fase yang mencerminkan perubahan social dan politik negara (Putri, Eliya, Prabawati, Al-Firdaus, & Fauzi, 2024). Indonesia telah menerapkan berbagai kurikulum dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, masing-masing dengan pendekatan dan tujuan yang berbeda. Salah satu yang pertama adalah *Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2004*, yang

mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap ke dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. KBK memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan silabus dan metode penilaian sesuai dengan kondisi lokal masing-masing, sehingga kurikulum ini menekankan fleksibilitas dan relevansi terhadap kebutuhan daerah. Kurikulum ini diikuti oleh *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006*, yang masih mempertahankan banyak elemen dari KBK namun lebih menonjolkan semangat desentralisasi. Dalam KTSP, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dasar, sementara sekolah memiliki kewenangan dalam menyusun materi pembelajaran dan evaluasi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal (Fitriana, Ahid, Prasetyo, & Daratista, 2022).

Berlanjut pada tahun 2013, Indonesia menerapkan *Kurikulum 2013 (K-13)* yang menggantikan KTSP. Kurikulum ini menitikberatkan pada tiga aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Materi pelajaran dalam K-13 mengalami beberapa perubahan, dengan beberapa materi dirampingkan seperti Bahasa Indonesia dan IPS, sementara materi seperti Matematika ditambahkan untuk memperkaya konten (Hutabarat, Elindra, & Harahap, 2022). Guru diharapkan mampu mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan observasi, bertanya, bernalar, dan berkomunikasi, sekaligus menanamkan nilai tanggung jawab lingkungan, interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Dengan pendekatan ini, K-13 bertujuan membentuk siswa yang tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga memiliki karakter dan keterampilan hidup yang kuat (Suryani et al., 2023).

Terakhir, *Kurikulum Merdeka* diperkenalkan pada Februari 2022 sebagai bagian dari program Merdeka Belajar. Kurikulum ini menekankan pengembangan karakter *Profil Pelajar Pancasila* dan pembelajaran intrakurikuler yang lebih beragam. Dengan memberikan keleluasaan kepada guru untuk memilih perangkat ajar, kurikulum ini memungkinkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa (Masri, Rusdinal, & Nurhizrah Gistituati, 2023). Proyek berbasis tema yang mendukung penguatan nilai Pancasila dirancang tanpa mengikat pada capaian mata pelajaran tertentu, sehingga memberikan ruang eksplorasi yang lebih luas bagi siswa. Tahapan implementasi Kurikulum Merdeka dimulai dengan *Mandiri Belajar*, dilanjutkan ke *Mandiri Berubah*, hingga akhirnya mencapai *Mandiri Berbagi*, menandai proses transisi bertahap menuju sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan adaptif (Shofia Hattarina et al., 2022).

Filosofi *Merdeka Belajar*, yang menjadi dasar dari Kurikulum Merdeka, telah diuraikan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024 berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020. Kurikulum ini menandai pergeseran paradigma pendidikan menuju sistem yang lebih fleksibel, berorientasi pada kompetensi, dan berfokus pada pengembangan karakter serta keterampilan lunak (*soft skills*). Pasal 55 dalam Permendikbud tersebut menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka dirancang untuk memenuhi kebutuhan dunia dengan tetap mengakomodasi karakteristik lokal (Marisa, 2021). Filosofi ini bertujuan mendorong pembelajaran yang tidak hanya berbasis pengetahuan, tetapi juga membangun kemampuan kritis dan nilai-nilai luhur dalam diri siswa (Nasution, 2023).

Pengembangan Kurikulum Merdeka dimulai pada 10 Desember 2019 oleh Nadiem Makarim sebagai penyempurnaan dari Kurikulum 2013. Empat kebijakan utama diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021 untuk mendukung penerapan kurikulum ini (Nasution, 2023). Pertama, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) diganti dengan asesmen yang diselenggarakan oleh sekolah, memberikan fleksibilitas kepada guru dalam menilai hasil belajar siswa secara komprehensif (Nurwiati, 2022). Kedua, Ujian Nasional diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter yang mengutamakan literasi, numerasi, dan pengembangan karakter berdasarkan praktik terbaik internasional seperti PISA dan TIMSS. Ketiga, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menjadi tiga komponen inti tujuan, kegiatan, dan asesmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Keempat, kebijakan penerimaan siswa

baru menjadi lebih fleksibel untuk mengurangi ketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah.

Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan potensi siswa dan konteks lingkungan. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 menjadi pedoman penting dalam penerapan kurikulum ini, yang bertujuan mendukung pemulihan pembelajaran dan menciptakan profil Pelajar Pancasila (Mailin, 2021). Profil ini mencakup siswa yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan menghargai keberagaman global. Dengan konsep ini, Kurikulum Merdeka diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia Maju melalui pendidikan yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian (Daga, 2020).

Kemudian, dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022, pedoman penerapan kurikulum ini mengalami revisi untuk lebih menyempurnakan arah kebijakan (Masri et al., 2023). Perubahan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan penerapan Kurikulum Merdeka yang lebih relevan dan adaptif terhadap kebutuhan pendidikan nasional (Shofia Hattarina et al., 2022). Dengan fleksibilitas yang diberikan, kurikulum ini diharapkan mampu menjawab tantangan pendidikan modern sekaligus memperkuat karakter siswa sebagai agen perubahan di era global (Marisa, 2021).

Pelaksanaan kurikulum merdeka tentunya tidak berjalan mulus seperti yang direncanakan, terdapat hambatan dan tantangannya. Pada Sekolah Dasar di Kota Bima dilaksanakan Secara bertahap, Kurikulum Merdeka mulai diterapkan di seluruh Indonesia, termasuk di sekolah-sekolah dasar di Kota Bima. Penerapan di Kota Bima dimulai pada tahun 2022, dengan beberapa sekolah yang terpilih menjadi Sekolah Penggerak. Sekolah-sekolah ini menjadi pionir dalam implementasi Kurikulum Merdeka dan mendapat pelatihan khusus serta dukungan penuh dari pemerintah pusat dan dinas pendidikan daerah. Selanjutnya, penerapan Kurikulum Merdeka semakin meluas ke sekolah-sekolah lainnya melalui program Sekolah Mandiri, di mana sekolah memiliki opsi untuk menerapkan kurikulum baru ini secara sukarela. Yang penerapannya da dasari dari Fokus pada Pembelajaran yang Berpusat pada Siswa: Kurikulum Merdeka memberikan ruang lebih besar bagi siswa untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kecepatan belajar mereka (Nasution, 2023). Di Kota Bima, pendekatan ini diharapkan dapat mengakomodasi keragaman kemampuan siswa, mengingat latar belakang sosial-ekonomi yang berbeda-beda (Nurwiatin, 2022).

Kemandirian Guru dalam Mengajar: Dalam Kurikulum Merdeka, guru diberikan kebebasan lebih besar untuk merancang dan menyesuaikan materi pelajaran (Nasution, 2023). Guru dapat menggunakan berbagai modul ajar yang telah disediakan atau mengembangkan modul mereka sendiri yang sesuai dengan konteks lokal (Daga, 2020). Di sekolah-sekolah dasar di Kota Bima, hal ini memungkinkan guru untuk merancang pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan potensi lokal, misalnya terkait dengan budaya atau potensi ekonomi setempat (Mailin, 2021).

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila: Salah satu inovasi utama dalam Kurikulum Merdeka adalah proyek-proyek yang dirancang untuk memperkuat Profil Pelajar Pancasila. Proyek-proyek ini bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, dan inovasi melalui pembelajaran berbasis proyek. Di Kota Bima, proyek ini bisa disesuaikan dengan masalah dan potensi lokal, seperti pengelolaan sumber daya alam, pelestarian budaya, atau peningkatan kemandirian ekonomi komunitas.

Evaluasi yang Lebih Humanis: Kurikulum Merdeka juga menekankan evaluasi yang tidak hanya berfokus pada hasil ujian, tetapi lebih pada proses pembelajaran. Guru diharapkan dapat memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa berdasarkan perkembangan mereka selama proses pembelajaran, bukan hanya pada nilai ujian semata. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik

Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Raba Kota Bima

Indonesia yaitu Plt. Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri, Saryadi, S.T.,M.B.A didampingi oleh Kepala Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat Drs. Suka, M.Pd melakukan kunjungan kerja di 3 (tiga) Satuan Pendidikan yaitu: SDN 25 Santi Kota Bima, SMPN 7 Kota Bima dan SMK PP Negeri Bima pada Senin 29 Agustus 2022 (Balai Guru Penggerak: 2022). Tujuan dari kunjungan kerja ini adalah dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) secara mandiri pada satuan pendidikan pada Tahun Ajaran 2022/2023 serta memperkuat sinergi Kemendikbudristek RI dengan Pemerintah Daerah. Untuk lebih jelasnya Data tentang Sekolah Dasar yang melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar di Kecamatan Raba Kota Bima Sebagai Berikut:

Tabel 1. Daftar Satuan Pendidikan Pelaksana IKM

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH
1	50204664	SDN 39 Rabadompu Barat Kota Bima
2	50204667	SDN 37 Kendo Kota Bima
3	50204680	SDN 52 Busu Kota Bima
4	50204681	SDN 51 Rite Kota Bima
5	50204682	SDN 50 Penaraga Kota Bima
6	50204683	SDN 49 Rabangodu Selatan Kota Bima
7	50204690	SDN 15 Ntobo Kota Bima
8	50204702	SDN 30 Nitu Kota Bima
9	50204704	SDN 27 Rabadompu Timur Kota Bima
10	50204705	SDN 26 Rabadompu Barat Kota Bima
11	50204707	SDN 24 Rabangodu Utara Kota Bima
12	50204711	SDN 20 Rabadompu Timur Kota Bima
13	50204712	SDN 19 Rabangodu Utara Kota Bima
14	50204743	SDN 71 Wenggo Kota Bima
15	50204751	SDN 63 Dodu Kota Bima
16	50204752	SDN 62 Rontu Kota Bima
17	50204754	SDN 72 Ntobo Kota Bima
18	50204755	SDN 73 Sabali Kota Bima
19	50204668	SDN 36 Nggaralo Kota Bima
20	50204696	SDN 8 Penanae Kota Bima
21	50204745	SDN 69 Kabanta Kota Bima
22	69980931	SDIT Ulul Albaab Kota Bima
23	70025374	SD Sekolah Alam Al Quran Bima
24	70031457	SDIT Delima Kota Bima
25	50204699	SDN 5 Rabangodu Utara Kota Bima
26	70044351	SDIT Imam Ahmad Rite Kota Bima

Sumber Data: <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/pelaksana-ikm>

Walaupun Kurikulum Merdeka menawarkan berbagai keuntungan, pelaksanaannya di Kota Bima tidak lepas dari berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan utama adalah kesiapan guru. Tidak semua guru memiliki keterampilan yang memadai untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan bagi guru menjadi sangat perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan penerapan kurikulum ini. Program Sekolah Penggerak menyediakan pelatihan intensif, tetapi sekolah lain yang belum mengikuti program ini mungkin membutuhkan dukungan lebih lanjut. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi faktor pendukung. di beberapa daerah di Kota Bima, akses terhadap teknologi masih terbatas. Ini bisa menghambat implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, terutama dalam hal penggunaan platform digital

dan modul pembelajaran berbasis teknologi. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menyediakan infrastruktur yang memadai, terutama di sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil. Dukungan dari orang tua dan masyarakat juga menjadi aspek yang sangat perlu dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Pendidikan yang berbasis pendekatan holistik tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga pada sinergi antara keluarga dan masyarakat. Di Kota Bima, peningkatan kesadaran dan pemahaman orang tua tentang pentingnya Kurikulum Merdeka Belajar perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan komunikasi yang lebih baik.

Kurangnya pemahaman dan persiapan guru menjadi salah satu kendala dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. Guru membutuhkan pemahaman yang baik tentang Kurikulum Merdeka, baik dari segi konsep, strategi pembelajaran, hingga penilaian hasil belajar. Kurangnya pemahaman dan persiapan guru dapat menghambat efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Implementasi Kurikulum Merdeka membutuhkan sumber daya yang cukup, termasuk buku-buku teks, perangkat pembelajaran, dan pelatihan untuk guru. Keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka belajar di Sekolah Dasar. Perubahan Status Mata pelajaran yang tidak di dukung dengan buku literature dan sumber daya manusia seperti tanaga pendidik misalnya penambahan mata pelajaran Bahasa Inggris. Selain itu Perangkat ajar adalah ragam bahan ajar yang digunakan oleh guru dalam upayanya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran yang telah di tetapkan. Perangkat ajar terdiri dari buku teks pelajaran, modul ajar, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum operasional satuan pendidikan, video pembelajaran, dan lainnya. Belum ada sehingga belum berjalan dengan baik.

Perubahan sikap dan pola pikir siswa menjadi kendala dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Kurikulum Merdeka juga membutuhkan perubahan sikap dan pola pikir siswa, seperti meningkatkan rasa ingin tahu, kemandirian, dan kecerdasan sosial. Perubahan ini tidak terjadi secara instan dan membutuhkan waktu yang cukup. Tantangan adaptasi dengan kebijakan sebelumnya juga menjadi problematika dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum baru juga membutuhkan adaptasi terhadap kebijakan sebelumnya, seperti kurikulum 2013. Kurangnya koordinasi antara Kurikulum Merdeka dan kebijakan sebelumnya dapat menimbulkan problematika dalam pelaksanaan di Sekolah Dasar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam terkait implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar negeri. Metode ini dipilih untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, serta bagaimana persepsi para aktor terkait seperti guru, siswa, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Pendekatan ini juga bertujuan mengidentifikasi dinamika implementasi kebijakan, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta memberikan kontribusi berupa umpan balik kepada pembuat kebijakan berdasarkan temuan di lapangan. Informan penelitian meliputi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima, pengawas sekolah di Kecamatan Raba, kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua siswa, akademisi, dan wartawan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis data dilakukan secara berkelanjutan sejak awal hingga akhir penelitian. Proses analisis mencakup tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data dirangkum, difokuskan pada aspek penting, dan disederhanakan untuk mempermudah identifikasi tema dan pola yang relevan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam

bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang ditarik bersifat sementara, namun menjadi kredibel apabila didukung oleh bukti yang valid dan konsisten selama proses pengumpulan data berlangsung. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan, tetapi juga memungkinkan eksplorasi lebih lanjut sesuai dinamika di lapangan, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan kontekstual.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada dua indikator utama, yaitu implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Raba dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Analisis ini diawali dengan menggali bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lingkungan sekolah dasar, termasuk strategi, peran pemangku kepentingan, serta tantangan yang dihadapi selama proses pelaksanaan. Selanjutnya, pembahasan akan diarahkan pada evaluasi dampak Kurikulum Merdeka, terutama dalam meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, baik dalam aspek akademik seperti literasi dan numerasi, maupun penguatan karakter sesuai Profil Pelajar. Dengan mendasarkan analisis pada data empiris yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, bagian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan Kurikulum Merdeka di Kecamatan Raba, serta kontribusinya dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat.

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Raba

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Raba Kota Bima memberikan kesempatan luas kepada siswa untuk secara aktif menggali isu-isu faktual dan kontekstual. Dalam pelaksanaannya, sekolah diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari tiga opsi dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Opsi pertama adalah menerapkan sebagian prinsip Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum yang sedang digunakan. Kedua, sekolah dapat menggunakan Kurikulum Merdeka dengan memanfaatkan sarana pembelajaran yang telah disiapkan. Ketiga, sekolah memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan perangkat ajar mereka sendiri. Keunggulan utama Kurikulum Merdeka adalah pendekatannya yang lebih sederhana dan mendalam, serta memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk beradaptasi sesuai tingkat perkembangan masing-masing.

Fokus utama dari Kurikulum Merdeka adalah pengembangan kompetensi siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Raba Kota Bima, guru diajak untuk menjadi fasilitator, tutor, sekaligus inspirator bagi siswa. Dalam konteks ini, kepala sekolah memainkan peran penting sebagai pemimpin transformasi. Kepala sekolah di SD Negeri Kecamatan Raba didorong untuk membimbing, mengarahkan, dan menginspirasi semua elemen sekolah menuju perubahan yang lebih baik. Kepemimpinan yang baik memungkinkan sekolah dengan fasilitas yang terbatas sekalipun dapat menjadi agen perubahan pendidikan.

Salah satu inovasi menarik yang diterapkan oleh kepala sekolah adalah pengelolaan administrasi berbasis digital melalui konsep "paperless." Administrasi sekolah dikelola melalui sebuah dashboard khusus, di mana guru dapat mengunggah dokumen penting secara berkala. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan sekolah tetapi juga mendorong guru untuk memanfaatkan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, supervisi dan diskusi dilakukan secara berkala, sehingga hambatan dalam proses pembelajaran dapat segera diatasi.

Selain kepemimpinan kepala sekolah, peran guru sangat penting dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Guru di SD Negeri Kecamatan Raba didorong untuk

menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menantang setiap harinya. Tantangan utama yang dihadapi adalah merancang pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa sekaligus memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar. Kepala sekolah dan guru saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pelatihan dan pendampingan. Bahkan, staf non-pengajar seperti penjaga sekolah juga dilatih untuk memanfaatkan teknologi, menjadikan seluruh elemen sekolah berpartisipasi aktif dalam transformasi pendidikan.

Kurikulum Merdeka di SD Negeri Kecamatan Raba Kota Bima juga menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dan komunitas dalam mendukung program sekolah. Salah satu contoh konkrit adalah pameran hasil karya siswa yang melibatkan dukungan dari orang tua dan dinas terkait. Kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan kreativitas siswa tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Meskipun dengan fasilitas terbatas, sekolah mampu menunjukkan hasil pembelajaran yang berkualitas melalui kerja sama yang baik dengan semua pihak.

Struktur Kurikulum Merdeka di sekolah ini mencakup kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam pelaksanaannya, struktur kurikulum dibagi menjadi tiga fase: Fase A untuk kelas I dan II, Fase B untuk kelas III dan IV, dan Fase C untuk kelas V dan VI. Di setiap fase, fokus pembelajaran diarahkan pada pengembangan literasi, numerasi, dan karakter siswa. Penilaian dilakukan secara komprehensif tanpa tekanan skor minimal, sehingga siswa bebas mengeksplorasi bakat dan minatnya.

Tantangan utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah perubahan pola pikir guru dan keterbatasan sumber daya manusia. Guru-guru senior, misalnya, perlu diberikan pendekatan yang tepat agar mereka mau beradaptasi dengan metode baru. Kepala sekolah harus mampu memberikan arahan yang jelas dan strategi yang efektif untuk mengajak seluruh staf sekolah bergerak ke arah yang sama. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting. Sekolah membutuhkan dukungan dari pemerintah dan pihak terkait untuk melengkapi kebutuhan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi.

Kurikulum Merdeka juga menawarkan konsep penilaian yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Tidak ada lagi standar Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD); penilaian kini mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP). Guru didorong untuk menggunakan Modul Ajar sebagai panduan dalam proses pembelajaran. Modul Ajar ini dirancang secara mandiri oleh guru berdasarkan kebutuhan siswa. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan relevan dengan konteks lokal, sekaligus tetap mengacu pada standar nasional.

Secara keseluruhan, implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Raba Kota Bima telah menunjukkan berbagai dampak positif. Selain menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan menyenangkan, kurikulum ini juga memberikan kebebasan kepada siswa dan guru untuk berkreasi. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, semangat perubahan yang ditunjukkan oleh kepala sekolah, guru, dan seluruh elemen sekolah menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang lebih baik. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penentu dalam memperkuat pelaksanaan Kurikulum Merdeka di masa depan.

Dampak Kurikulum Merdeka terhadap Hasil Belajar Siswa

Penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Raba, Kota Bima, telah membawa perubahan signifikan dalam proses pembelajaran. Setelah sekolah-sekolah ini terpilih sebagai Sekolah Penggerak, dilakukan berbagai pelatihan dan In-House Training (IHT) yang melibatkan Komite Pembelajaran. Komite ini terdiri dari sejumlah guru yang diberi pembekalan mendalam terkait implementasi Kurikulum Merdeka. Transformasi ini menuntut penyesuaian kurikulum yang dikenal sebagai Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan

(KOSP), yang dirancang untuk mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan lokal sekolah. Perubahan kurikulum ini tidak hanya berfokus pada struktur pembelajaran, tetapi juga pada capaian pembelajaran yang lebih berorientasi pada hasil nyata, baik dalam literasi, numerasi, maupun penguatan karakter.

Salah satu perbedaan utama yang dirasakan adalah penghapusan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), yang digantikan oleh Capaian Pembelajaran (CP). Selain itu, Silabus berganti menjadi Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disederhanakan menjadi Modul Ajar. Penyusunan KOSP melibatkan elemen-elemen seperti visi-misi, pengorganisasian pembelajaran, serta kalender akademik yang selaras dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003. Langkah-langkah ini memastikan bahwa pendidikan di Kecamatan Raba tidak hanya mencakup penguasaan materi akademik tetapi juga membangun fondasi karakter siswa.

Dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, guru-guru Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Raba, Kota Bima, mengikuti proses yang sistematis dalam menyusun Modul Ajar. Dimulai dari identifikasi tujuan pembelajaran, asesmen diagnostik untuk mengetahui kompetensi awal siswa, hingga penentuan metode pembelajaran yang relevan. Selain itu, aktivitas pembelajaran dirancang agar selaras dengan capaian pembelajaran, melibatkan siswa secara aktif, dan memberikan pengalaman yang bermakna. Kegiatan ini juga mencakup asesmen formatif dan sumatif untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran.

Pelaksanaan kurikulum ini terdiri atas dua komponen utama: pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil Pelajar Pancasila. Pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara rutin sesuai jadwal, sedangkan proyek penguatan profil Pelajar Pancasila dirancang untuk mengembangkan karakter siswa sesuai nilai-nilai Pancasila, seperti toleransi, keberagaman, dan anti-bullying. Pendekatan ini memberikan ruang bagi guru dan siswa untuk berinovasi, belajar secara mandiri, dan kreatif. Proyek-proyek tersebut juga membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak melalui aplikasi praktis yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil dari implementasi ini terlihat dalam peningkatan kualitas literasi dan numerasi siswa. Asesmen formatif, seperti tugas harian, portofolio, dan diskusi kelompok, memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan siswa. Sebagai contoh, siswa yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika menunjukkan peningkatan signifikan setelah dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran berbasis proyek. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang berpusat pada siswa mampu meningkatkan motivasi belajar mereka.

Selain aspek akademik, Kurikulum Merdeka juga berdampak pada penguatan karakter siswa. Proyek-proyek pembelajaran yang berorientasi pada profil Pelajar Pancasila memberikan pengalaman berharga bagi siswa dalam menerapkan nilai-nilai moral dan sosial. Evaluasi terhadap proyek ini menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih percaya diri, memiliki rasa tanggung jawab, dan mampu bekerja sama dalam kelompok. Pendekatan ini juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa dihargai dan didukung untuk mencapai potensi terbaiknya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Kecamatan Raba dilakukan secara komprehensif melalui asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang langsung kepada siswa, sementara asesmen sumatif dilakukan di akhir semester untuk mengukur capaian keseluruhan. Guru-guru di sekolah ini juga melibatkan teknologi seperti e-Rapor untuk mendokumentasikan hasil belajar siswa secara sistematis. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kemampuan siswa, yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Namun, implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Raba tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya,

seperti perangkat teknologi dan waktu untuk menyusun Modul Ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Meski demikian, melalui kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan Komite Pembelajaran, tantangan ini dapat diatasi secara bertahap. Pendampingan tambahan untuk guru dan pelatihan yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini.

Secara keseluruhan, Kurikulum Merdeka memberikan dampak positif yang signifikan terhadap hasil belajar siswa di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Raba, Kota Bima. Selain meningkatkan literasi dan numerasi, kurikulum ini juga berhasil mengembangkan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, upaya kolaboratif antara seluruh pemangku kepentingan memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai dengan baik. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka dapat menjadi model pembelajaran yang inspiratif untuk diterapkan di berbagai sekolah di Indonesia

Kesimpulan

Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Raba, Kota Bima, telah membawa dampak signifikan terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Kebijakan ini memberikan kebebasan kepada sekolah untuk memilih strategi penerapan yang sesuai, seperti menggunakan prinsip Kurikulum Merdeka secara parsial, memanfaatkan perangkat ajar yang tersedia, atau mengembangkan modul ajar mandiri. Fokus utama kurikulum ini adalah pengembangan kompetensi siswa melalui pendekatan sederhana, fleksibel, dan relevan, yang didukung oleh kepala sekolah sebagai pemimpin transformasi, guru sebagai fasilitator, serta keterlibatan aktif orang tua dan komunitas. Proyek penguatan profil Pelajar Pancasila yang menekankan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan anti-bullying membantu membangun karakter siswa, sementara pendekatan berbasis proyek meningkatkan kualitas literasi dan numerasi. Evaluasi pelaksanaan dilakukan melalui asesmen formatif dan sumatif, dibantu teknologi seperti e-Rapor, untuk memberikan gambaran holistik tentang kemampuan siswa. Meski tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan adaptasi pola pikir guru masih ada, pelatihan berkelanjutan dan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan berhasil mengatasinya. Transformasi digital, seperti pengelolaan administrasi berbasis dashboard, juga meningkatkan efisiensi operasional sekolah. Secara keseluruhan, Kurikulum Merdeka mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan siswa, menjadikannya model pendidikan inspiratif untuk diterapkan di sekolah lain di Indonesia. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat tetap menjadi elemen penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program ini.

BIBLIOGRAFI

- Ariyanti, Ketut Alit. (2023). Evaluasi Kebijakan Green Economy Di Banjar Kayumas Kelod Denpasar Bali. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(2). <https://doi.org/10.47532/jic.v6i2.908>
- Bourgeois, Isabelle, & Maltais, Stéphanie. (2023). Translating Evaluation Policy Into Practice in Government Organizations. *American Journal of Evaluation*, 44(3), 353–373. <https://doi.org/10.1177/10982140221079837>
- Carter. (2016). ORCA Online Research @ Cardiff. *Orca*, 1–2.
- Daga, Agustinus Tanggu. (2020). Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Sekolah Dasar (Sebuah Tinjauan Kurikulum 2006 hingga Kebijakan Merdeka Belajar). *Jurnal Edukasi Sumba (JES)*, 4(2), 103–110. <https://doi.org/10.53395/jes.v4i2.179>
- Dennis, L. (2018). Belonging: Transformation through education. *Mereon Matrix, the: Everything Connected through (K)nothing*, 6, 81–126. https://doi.org/10.1142/9789813233560_0004
- Dunlop, Claire A., Ongaro, Edoardo, & Baker, Keith. (2020). Researching COVID-19: A research agenda for public policy and administration scholars. *Public Policy and Administration*, 35(4), 365–383. <https://doi.org/10.1177/0952076720939631>
- Ewert, Benjamin, Loer, Kathrin, & Thomann, Eva. (2021). Beyond nudge: advancing the state-of-the-art of behavioural public policy and administration. *Policy and Politics*, 49(1), 3–23. <https://doi.org/10.1332/030557320X15987279194319>
- Fernandes, Reynaldo. (2023). Public policies and social progress: Two evaluation models. *Journal of Public Policy*, 43(2), 199–214. <https://doi.org/10.1017/S0143814X22000289>
- Ferretti, Valentina, Pluchinotta, Irene, & Tsoukiàs, Alexis. (2019). Studying the generation of alternatives in public policy making processes. *European Journal of Operational Research*, 273(1), 353–363. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.07.054>
- Fitriana, Leni Nurindah Lailatul, Ahid, Nur, Prasetyo, Guntur Eko, & Daratista, Iin. (2022). Kebijakan Pokok dan Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia. *Journal On Teacher Education, Volume 4*, 1505–1511.
- Hankivsky, Olena, & Cormier, Renee. (2011). Intersectionality and public policy: Some lessons from existing models. *Political Research Quarterly*, 64(1), 217–229. <https://doi.org/10.1177/1065912910376385>
- Hudson, Bob, Hunter, David, & Peckham, Stephen. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy Design and Practice*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>
- Hutabarat, Hasrida, Elindra, Rahmatika, & Harahap, Muhammad Syahril. (2022). Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Di Sma Negeri Sekota Padangsidempuan. *Jurnal MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 5(3), 58–69.
- Juli Iswanto, Fachruddin Azmi,. (2022). Merdeka Belajar. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIEM)*, 3(3), 157–171. <https://doi.org/10.47006/ijiem.v3i3.90>
- Kellie Praja Putra, H. Khasan Effendy, & Rossy Lambelanova. (2021). Evaluasi Kebijakan Pembekalan Kewirausahaan Aparatur Pra Purnabakti Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 12(4), 827–842. <https://doi.org/10.54783/jv.v12i4.343>
- Kern, Florian, Rogge, Karoline S., & Howlett, Michael. (2019). Policy mixes for sustainability transitions: New approaches and insights through bridging innovation and policy studies. *Research Policy*, 48(10), 103832. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.103832>
- Leckel, Anja, Veilleux, Sophie, & Dana, Leo Paul. (2020). Local Open Innovation: A means for public policy to increase collaboration for innovation in SMEs. *Technological*

- Forecasting and Social Change*, 153, 1–53.
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119891>
- Mailin, Mai. (2021). Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia*, 4(1), 68–75.
<https://doi.org/10.54583/apic.vol4.no1.59>
- Marisa, Mira. (2021). Inovasi Kurikulum “Merdeka Belajar” di Era Society 5.0. *Santhet: (Jurnal sejarah, Pendidikan dan Humaniora)*, 5(1), 72.
<https://doi.org/10.36526/js.v3i2.e-ISSN>
- Masri, Rusdinal, & Nurhizrah Gistituati. (2023). Implementasi kebijakan pendidikan kurikulum merdeka belajar. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 8(4), 347–352.
- Mergoni, Anna, & De Witte, Kristof. (2022). Policy evaluation and efficiency: a systematic literature review. *International Transactions in Operational Research*, 29(3), 1337–1359.
<https://doi.org/10.1111/itor.13012>
- Nasution, Suri Wahyuni. (2023). Assesment Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *EJoES (Educational Journal of Elementary School)*, 4(3), 135–142.
<https://doi.org/10.30596/ejoes.v4i3.16853>
- Nurwiatin, Neng. (2022). Pengaruh Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Dan Kesiapan Kepala Sekolah Terhadap Penyesuaian Pembelajaran Di Sekolah. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 9(2), 472–487.
<https://doi.org/10.47668/edusaintek.v9i2.537>
- Putri, Fricilla Amelia, Eliya, Maya, Prabawati, Dwi Putri, Al-Firdaus, Oriza Novandi, & Fauzi, Muhammad Akpan. (2024). Adaptasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Journal Of Elementary School Education (Jouese)*, 4(1), 277–283.
<https://doi.org/10.52657/jouese.v4i1.2226>
- Ramadina, Evy. (2021). Peran Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. *Mozaic : Islam Nusantara*, 7(2), 131–142.
<https://doi.org/10.47776/mozaic.v7i2.252>
- Rogers, Patricia J. (2007). *Theory-Based Evaluation: Reflections Ten Years On*. (114), 63–81.
<https://doi.org/10.1002/ev>
- Rusmiati, Mei Nur, Ashifa, Riswati, & Herlambang, Yusuf Tri. (2023). Analisis Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Naturalistic: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 7(2), 1490–1499.
<https://doi.org/10.35568/naturalistic.v7i2.2203>
- Santosa, Tifar Auradiva. (2021). Kebijakan Pengendalian Sampah Plastik Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang. *African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development*, 21(3), 1–1.
- Schmidt, Tobias S., & Sewerin, Sebastian. (2019). Measuring the temporal dynamics of policy mixes – An empirical analysis of renewable energy policy mixes’ balance and design features in nine countries. *Research Policy*, 48(10), 103557.
<https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.03.012>
- Schoenefeld, Jonas J., & Jordan, Andrew J. (2019). Environmental policy evaluation in the EU: between learning, accountability, and political opportunities? *Environmental Politics*, 28(2), 365–384. <https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1549782>
- Shofia Hattarina, Nurul Saila, Adenta Faradila, Dita Refani Putri, & RR.Ghina Ayu Putri. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Lembaga Pendidikan. *Seminar Nasional Sosial Sains, Pendidikan, Humaniora (SENASSDRA)*, 1, 181–192.
- Suryani, Novrita, Muspawi, Mohamad, & Aprillitza Vivayarti, Aprillitza Vivayarti. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 773. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3291>
- Tarigan, Aprianta, Sianturi, Laura Glene, br Sinaga, Melisa, Siringo-ringo, Putri Intan, & Naibaho, Vebri Meliarni Oktavia. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di

Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Raba Kota Bima

Desa Bandar Khalipah. *Majalah Ilmiah METHODODA*, 14(2), 268–273. <https://doi.org/10.46880/methoda.vol14no2.pp268-273>

Valle-Cruz, David, Criado, J. Ignacio, Sandoval-Almazán, Rodrigo, & Ruvalcaba-Gomez, Edgar A. (2020). Assessing the public policy-cycle framework in the age of artificial intelligence: From agenda-setting to policy evaluation. *Government Information Quarterly*, 37(4). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101509>

Wardani, Zenderi, Sukandar, Dadang, Baliwati, Yayuk Farida, & Riyadi, Hadi. (2021). Sebuah Alternatif: Indeks Stunting Sebagai Evaluasi Kebijakan Intervensi Balita Stunting Di Indonesia. *Gizi Indonesia*, 44(1), 21–30. <https://doi.org/10.36457/gizindo.v44i1.535>

Yansah, Okki, Asbari, Masduki, Jamaludin, Gilang Maulana, Marini, Arita, & Zulela, M. S. (2023). Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Tantangan dan Peluang. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(5), 48–52.

Copyright holder:

Putra Chairil Akbar, Bambang Kusbandrijo, Joko Widodo (2025)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

